

**MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN PEMEKARAN;
SEBUAH STUDI KASUS**

Wilmar E. Simandjorang¹

Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Kristen

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung

e-mail: wilmar.simandjorang@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini adalah merupakan penelitian ethnografi dengan pendekatan studi kasus dan data penelitian seluruhnya disajikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana Kabupaten Samosir yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Indonesia berstatus sebagai sebuah kabupaten yang sudah mengalami pemekaran dalam hal administrasi, batas-batas teritorial, serta jumlah penduduk berdasarkan peraturan pemerintahan. Data survey awal pada saat *preliminary study* membuktikan bahwa kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten yang telah mengalami pemekaran perlu dievaluasi dan dimonitoring serta diukur perkembangannya, untuk melihat kemajuan perkembangannya sejak dikukuhkan menjadi sebuah kabupaten baru sebagai pemekaran dari kabupaten sebelumnya yakni Kabupaten Toba Samosir (TOBASA). Artikel ini bertujuan untuk mengangkat *novelty* yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk tujuan mendapatkan data yang dapat dijadikan sebagai kontribusi untuk meningkatkan langkah-langkah dan strategi *up-grading* untuk keperluan peningkatan kualitas program pemerintah daerah selanjutnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari hasil analisis data tentang pengukuran keberhasilan kabupaten pemekaran yakni kabupaten Samosir, fakta yang signifikan meningkat adalah pencapaian visi Kabupaten Samosir menjadi daerah tujuan wisata lingkungan yang inovatif dan berskala nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Mengukur keberhasilan, Kabupaten pemekaran, studi kasus

¹[Dr. Wilmar E. Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl.Plan., M.Si](#) adalah salah seorang putra Pulau Samosir, alumni dari Fakultas Sosial Politik dari Prodi Business Administration Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1978), Business Administration and Economic dari Uni Scoula Superiore Enrico Mattei, Milan, Italy (1985), Post Graduate Course on Plan Implementation and Development Finance (Cycle B or Master's Degree in Development Economics), Prodi Magister (S2) Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Pascasarjana USU (1999) dan Prodi Doktor (S3) Teologi konsentrasi misi dari Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung (2020)



PENDAHULUAN

Sejarah Berdirinya Kabupaten Samosir

Lahirnya Kabupaten Samosir dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dan diresmikan 7 Januari 2004, kemudian Penjabat Bupati dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 dan resmi dilepas/*dipajae* dari Kabupaten Toba Samosir tanggal 26 Januari 2004. Kelahiran Kabupaten Samosir disambut masyarakat dengan gembira sampai ke pelosok desa-desa terpencil yang nan jauh di pegunungan, dataran Bukit Barisan dan di pantai-pantai Pulau Samosir dengan sejuta harapan

PEMBAHASAN HASIL

Adapun pondasi Kabupaten Samosir

1. Paradigma dan Strategi Samosir Membangun

Dengan kerangka pikir manajemen strategis, dengan menggunakan peralatan pisau analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT), telah berketetapan hati untuk memutuskan paradigma kerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yaitu “Samosir Membangun”, dengan kepemimpinan parhobas (stewardship), bentuk kelembagaan dirancang bangun dengan berpedoman ramping struktur kaya fungsi yang sesuai prinsip manajemen strategis dan mengacu kepada potensi dan beban kerja yang diimbangi melalui analisis beban kerja maka kelembagaan cukup hanya 12 eselon 2 dan diisi dari sumber aparatur (pegawai yang tersedia) dan dilantik secara definitif.

Para pejabat yang diangkat untuk menduduki posisi pemerintahan dituntut harus mampu mengedepankan kepentingan rakyat yang dilayani dan bekerja secara profesional

serta digerakkan oleh misi (mission driven), bukan oleh anggaran semata (budget driven), sehingga anggaran Kabupaten/Provinsi/Pusat hanya sebagai penunjang semua kegiatan mulai dari kegiatan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, dengan mendorong keikutsertaan lembaga sosial masyarakat (LSM) serta dunia usaha.

Pemerintah berkedudukan adalah sebagai pengarah/paniroi-panggomgomi bukanlah panggorga (steering than rowing). Dengan system yang demikian ini kunci keberhasilan kebijakan dan program pemerintah Kabupaten terletak pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pada system manajemen pemerintahan mulai dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerak-an dan pengendalian.

2. Strategi dasar kebijakan Samosir

Membangun daerah yang pertama dan terutama harus mengacu kepada: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tangguh meliputi emosi, spiritual dan intelektual (ESQ), dengan pradigma pembangunan berkelanjutan, pembangunan bersifat inklusif dan berdimensi kewilayahan. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada menjadi satu kesatuan geoekonomi baik lokal, maupun regional dan nasional serta internasional, dengan mengutamakan pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.

Dalam rangka selalu menjaga terwujudnya baik keseerasian, keharmonisan maupun keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Strategi pembangunan berpedoman pada keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja

dan pelestarian lingkungan. Menyediakan infrastruktur yang memadai, dimana secara rinci telah dimuat dalam Rencana Strategik Samosir Membangun 2004-2005.

3. Tahapan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung

Pola pikir untuk Samosir Membangun tahapannya: Pertama, dalam jangka pendek yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah mengisi perut rakyat, yakni mengembangkan pertanian khas lokal yang sudah turun temurun teknologi pertanian dikuasai oleh masyarakat dengan hortikulturanya. Kedua, dalam jangka menengah baru masuk ke sector perkebunan dan tanam-tanaman konservasi lingkungan yang bernilai ekonomis dan lingkungan sekaligus hasilnya dapat menambah pendapatan rakyat dan barulah kemudian masuk ke industri pengolahan hasil pertanian untuk menaikkan nilai tambah. Ketiga, berjangka panjang masuk ke industri jasa khususnya industri pariwisata yang potensinya melimpah di Kabupaten Samosir yakni berupa keaneka-ragaman lingkungan, keanekaragaman hayati serta keanekaragaman budaya yang merupakan berkat Tuhan yang luar biasa kepada rakyat Samosir. Tahapan-tahapan di atas harus dilalui secara baik sehingga masyarakat Samosir tidak tercabut dari akar budaya dan kearifan lokal.

Infrastruktur sangat diperlukan, yaitu: meliputi (1) Infrastruktur keras fisik (*physical hard infrastructure*), yaitu; jalan raya, bandara, dermaga dan pelabuhan, bendungan, saluran irigasi dan sebagainya; (2) Infrastruktur non fisik (*non physical hard infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi *utilitas* umum, ketersediaan air bersih berikut instalasi

pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon, internet), pasokan energi dan berikut jaringan distribusinya; (3) Infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencakup kelembagaan yang meliputi berbagai nilai sosial dan ekonomi serta religi; termasuk agama, budaya, etos kerja, norma (peraturan adat, peraturan hukum, peraturan daerah), kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah harus berkualitas dalam melayani masyarakat dengan baik.

Dalam jangka pendek difokuskan pada pembangunan infrastruktur lunak, yaitu tersedianya SDM yang handal dan berkarakter kuat dengan berlandaskan nilai-nilai budaya dan agama, untuk menggali potensi dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia khususnya bidang kepariwisataan. Kelembagaan dan kearifan lokal diberdayakan dan dikelola secara profesional, di antaranya Kelompok Tani perlu ditumbuhkembangkan mulai dari sistem, kelembagaan dan manajerial, peralatan, pemasarannya, terutama dalam mengembangkan wawasannya.

Kegiatan pembangunan jangka menengah sebagai kelanjutan kegiatan-kegiatan sebelumnya dengan memantapkan infrastruktur fisik dan non fisik melalui perhatian khusus pada pembangunan jaringan jalan lingkar dalam Kabupaten Samosir yang mantap dan membuka akses antar kecamatan dan antar desa. Mendorong segera dibangun jaringan jalan lingkar luar untuk membuka keterisolasian Samosir dengan menghubungkan daratan mulai dari Sitio-tio ke Sianjur Mula-mula sampai ke perbatasan Silalahi untuk

meperlancar arus barang/jasa, dan manusia/wisatawan yang datang via Kabupaten Dairi dan Karo, khususnya menarik pengunjung Berastagi turun ke Samosir.

Kemudian jangka panjang adalah membangun jembatan penghubung Sigapiton ke Sirungkunon dengan menggandeng putra-putri Samosir dan investor dalam negeri/asing dengan *win-win solution* antar pihak. Dan lebih lanjut memanfaatkan Danau Toba sebagai landasan pendaratan pesawat amfibi untuk wisatawan sehingga tidak memerlukan investasi yang besar untuk bandar udara.

Akhirnya dengan tahapan pembangunan seperti di atas dan didukung oleh penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai dapat mewujudkan “Samosir sebagai salah satu destinasi wisata terdepan di dunia”.

SIMPULAN

Untuk mewujudkan pembangunan Samosir sesuai dengan fondasi yang telah diletakkan 17 tahun yang lalu, tentunya sudah banyak hal telah direncanakan dan sudah banyak pula yang dikerjakan, sehingga apa yang telah dicapai selama Tujuh Belas Tahun yang secara perencanaan sudah memasuki tahapan jangka panjang, secara legal formal dapat dijawab dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, indeks ketimpangan, pendapatan asli daerah, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya.

Bila kita ingin mengetahui keakuratan-nya dan korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Samosir tentu diperlukan suatu kajian kebijakan dengan analisis ekonometrika yang lebih mendalam.

Dengan mengajukan paling tidak sebanyak 15 pertanyaan mendasar dan juga sekaligus akan dapat dipakai sebagai indikator untuk mengetahui keberhasilan suatu daerah pemekaran, tentunya harus bermuara kepada kemandirian masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing Samosir. Dan tentunya untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang diraih setelah 17 Tahun usia Kabupaten Samosir, perlu dijawab baik secara kuantitatif maupun kualitatif indicator-indikator di antaranya:

- (1) Bentuk kelembagaan dan gaya kepemimpinan yang melayani sebagai *parhobaskah*?
- (2) Pembangunan sudah direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan tepat waktukah?
- (3) Sudahkah semua pemegang kepentingan terlibat aktif (tidak hanya menjadi penonton)?
- (4) Infrastruktur keras dan lunak sudahkah tersedia sesuai kebutuhan?
- (5) Bahan-bahan hasil pertanian (lagu kebanggaan masyarakat Samosir: *gok disi hassang, eme nang bawang, rarak do pinahan didolok i*) termasuk tuak masih datang dari luar Samosirkah?
- (6) Uang hasil pembangunan masih banyakkah mengalir ke luar Samosir untuk belanja barang hasil pertanian dan tenaga kerja?
- (7) Masihkah terjadi kemacetan pada musim Natal dan Tahun Baru di Tomok?

- (8) [Jalan-jalan/fasilitas ke objek wisata sudahkah mulus?](#)
- (9) [Sarana pendidikan sudah tertatakah dan guru-guru/ murid-murid sudah bergembira ria dalam proses pembelajaran?](#)
- (10) [Sejauh mana tersedia air untuk pertanian dan air untuk keperluan rumah tangga?](#)
- (11) [Seberapa banyak rumah tangga yang sudah mempunyai MCK yang layak?](#)
- (12) [Masihkah kerbau mandi dan masyarakat mencuci pakaian serta membuang sampah di Danau Toba?](#)
- (13) [Bagaimana keadaan Kabupaten Samosir seandainya jika dibandingkan dengan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai saudara kembar Kabupaten Samosir?](#)
- (14) [Sudah berada dimana pencapaian Visi Kabupaten Samosir “menjadi daerah tujuan wisata lingkungan yang inovatif”?](#)
- (15) [The last but not the least, pertanyaan kunci ialah sejauh mana rakyat mencintai Samosir dan mengagumi pemimpinnya?.](#)

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dapat dijadikan instrument menentukan sudah seberapa jauh sebuah kabupaten berhasil dalam melangsungkan kehidupannya ke depan. Menarik untuk diteliti lebih lanjut!!!.

Cinta Kasih Pengmas KKPPD, Sidikalang.

Kuncoro Murdrajad (2004), Otonomi & Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo (2004), Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Rafinus Bobby Hamzar, Gurmanti Aprizul (2001), Sistem Pengelolaan Pembangunan, LAN RI, Jakarta.

Syaukani, Gaffar Afan, Rasyid Ryaas (2003), Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yudoyono Bambang (2002), Otonomi Daerah Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur dan Anggota DPRD, Sinar Harapan, Jakarta.

Widaja, AW. (1995), Titik Berat Otonomi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

Center For Stratwegic And International Studies (2002), Tiga Tahun OTDA: Persoalan yang Belum Terpecahkan, Jakarta

Esmara Hendra (1983). Memelihara Momentum Pembangunan, Gramedia, Jakarta.

Jiis (1992). Dari Otonomi Ke Disintegrasi, PAU-IS-UI, Gramedia, Jakarta.

KSPPM, (2000), Otonomi Daerah, Yayasan